

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Majapahit merupakan kerajaan terbesar di Indonesia yang berdiri kurang lebih dua setengah abad lamanya (tahun 1293-1525 M) di Jawa Timur. Kemajuan peradaban kerajaan Majapahit digambarkan kitab *Nagarakertagama* sebagai kerajaan dengan sistem ketatanegaraan yang sangat teratur dari segi sosial-politik, keagamaan, kebudayaan, adat-istiadat, dan kesusasteraan (Mulyana, 2009). Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang memiliki sejarah yang membanggakan yang diwariskan kepada Indonesia. Hal ini terlihat dengan adanya symbol Negara yang diilhami dari karya-karya zaman Majapahit, seperti ungkapan *Bhineka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa* yang diangkat menjadi symbol Negara Indonesia. Penggal kalimat pertama menjadi semboyan bangsa Indonesia sedangkan penggal kalimat kedua menjadi janji kesetiaan tunggal Lembaga Pertahanan Nasional terhadap NKRI . Selain itu pilihan warna merah-putih untuk bendera Indonesia merupakan warna yang dipakai sebagai bendera kerajaan Majapahit (Lutfillah, 2021).

Berbicara mengenai sejarah Majapahit tidak dapat dilepaskan dengan beberapa hal penting yang layak dicatat dalam sejarah, yakni: 1) gagasan dan realisasi perluasan wilayah dominasi dengan menyatukan wilayah Nusantara melalui spirit Sumpah Palapa oleh Gajah Mada di masa pemerintahan

Tribuwanatunggadewi yang berlanjut pada pemerintahan Hayam Wuruk , dan 2) penempatan peran wanita dalam struktur pemerintahan kerajaan, dengan tampilnya Tribuwanatunggadewi sebagai raja Majapahit ketiga dan Suhita sebagai raja Majapahit keenam (Adji & Achmad, se). Dalam hal ini Sejarah Majapahit merupakan cermin kemajuan Negara kerajaan dan ketertiban masyarakat. Sekilas tentang Majapahit mengantar pada pemikiran tentang keberadaan seorang akuntan yang dipastikan mempunyai peran sentral dalam setiap urusan di zaman Majapahit. Untuk dapat mendalami akuntansi pada zaman Majapahit, maka diperlukan pemahaman mengenai akuntansi itu sendiri.

Akuntansi di Indonesia masuk ke Indonesia pada masa kerajaan-kerajaan masa lalu, seperti Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Mataram. Era kerajaan dapat dianggap sebagai titik awal perkembangan akuntansi di Indonesia. Diperkirakan kerajaan-kerajaan tersebut mengelola keuangannya dengan cukup baik, terbukti dari besarnya kerajaan dan luasnya jaringan perdagangannya hingga ke Eropa. Studi ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki pengetahuan akuntansi tersendiri yang diperoleh dari kondisi lingkungan, situasi ekonomi dan sosial yang sesuai dengan nilai dan ciri khas Indonesia.

Proses awal lahirnya akuntansi tidak semata dipandang sebagai tehnik untuk mengumpulkan dan menyajikan data keuangan untuk kepentingan pengambilan keputusan, melainkan sebagai kekuatan yang membentuk (*constructive*) kehidupan sosial masyarakat (Loft, 1986). Selain itu, akuntansi tidak lepas dari bagian integral seperti tata kelola, akuntabilitas, keberlanjutan, dan proses pengendalian atau pengawasan (Sukoharsono & Gaffikin, 1993). Tata kelola suatu negara atau

kerajaan tidak lepas dari kondisi lingkungan internal dan eksternal, baik dari aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan spiritual. Di sisi lain. Miller & Power, 2013 menjelaskan bahwa akuntansi sebagai fungsi yang kompleks dan terdiri dari unsur - unsur yang berbeda, seperti: Ide, hukum, instrumen birokrasi, laporan, standar, register akuntan, dan hubungan sosial akuntan dengan masyarakat (Miller & Power, 2013). Secara keseluruhan definisi tersebut membawa akuntansi pada rangkaian aktifitas yang tidak dapat dilepaskan dari sifat teknis yang orientasinya untuk pengambilan keputusan, dimana rangkaian aktifitas tersebut tidak terlepas dari nilai (value laden).

Definisi akuntansi menjadi bervariasi pada saat akuntansi diteropong menggunakan kerangka multiparadigma. Di antara keberagaman definisi tersebut Kamayanti, 2016 memberikan solusi dalam menjawab pertanyaan tentang apa sebenarnya akuntansi dengan terlebih dahulu memahami tentang realitas. Realitas akuntansi meliputi realitas fisik dan non fisik. Merujuk pada penjelasan tersebut, untuk dapat mengembangkan suatu struktur dan praktik akuntansi di suatu wilayah atau Negara tertentu, tidak cukup dengan mempelajari praktik akuntansi saja. Perkembangan Majapahit juga tidak terlepas dari pajak yang memberikan solusi terhadap perekonomian masyarakat, melalui penciptaan peraturan perpajakan.

Kata Pajak berasal dari kata Ajeg dalam bahasa Jawa yang bermakna iuran rakyat secara teratur kepada raja. Iuran tersebut berupa hasil pertanian (bagi petani) atau dalam bentuk mengabdikan sebagai pegawai kerajaan bagi yang bukan petani (Meliala, 2007). Sumber penghasilan kerajaan Majapahit antara lain berasal dari pajak dan denda atas segala tindak pidana yang dijatuhkan dalam sidang pengadilan

(*sukha dukha*) (Boechari, 2014). Selain pajak dan *sukha dukha* kerajaan juga berhak atas buat *haji*, yaitu persembahan kepada raja (Nastiti, 2003) persembahan dilakukan dalam bentuk kerja sukarela atau persembahan dalam bentuk lain.

Pajak pada masa Majapahit dipungut atas tanah atau hasil pertanian, badan usaha, pajak industri rumahan, pajak profesi, dan pajak orang asing (penduduk Kialan) yang lupa berbisnis di Majapahit. Pajak tersebut dapat berupa hasil pertanian (beras) maupun dalam bentuk lain (emas, perak). Istilah pajak di masa Majapahit dikenal dengan *drawya haji*, yang berarti milik raja. Analog milik raja dan pajak didasarkan pada suatu anggapan bahwa raja pemegang hak atas tanah dan hak rakyat atas tanah hanya sebatas mengelola tanah (Dwijanto, 1997). Penjelasan atau pemikiran akuntansi, yang salah satunya mengkaji kesejarahan akuntansi, sangat diperlukan sebagai cara untuk mengetahui secara baik tentang teori dan praktik dalam mencapai tujuan akuntansi (Suwardjono, 2005).

Penelitian sejarah akuntansi menawarkan ruang lingkup lebih luas dalam memberikan wawasan akuntansi saat ini dan mempunyai potensi masa depan untuk perkembangan praktik dan ide pemikiran akuntansi (Carnegie & Napier, 1996). Sejarah menurut Kuntowijoyo (2013) merupakan rekrontuksi masa lalu. Faktanya, ini cukup menunjukkan bahwa sejarah memiliki kepentingan yang sangat besar. Sejarah akuntansi merupakan penelitian proses evolusi dalam pemikiran, praktik, dan lembaga dengan menekankan interaksi dinamis antara akuntansi dengan lingkungannya sebagai titik pusat dalam penelitian akuntansi (Someya, 1989). Hal ini menegaskan bahwa praktik akuntansi suatu wilayah negara sebenarnya tidak

terjadi begitu saja secara alamiah, tetapi dirancang dan dikembangkan secara sengaja untuk mencapai tujuan sosial tertentu.

Akuntansi yang lahir di Indonesia dengan sendirinya menampilkan nilai sosial, politik, budaya, dan ketuhanan yang menampilkan ciri khas Indonesia. Perubahan konsep akuntansi menciptakan suatu refleksi dalam penelitian sejarah akuntansi (Gomes, 2008). Hal ini menyebabkan terjadinya klasifikasi sejarah akuntansi dalam dua kategori, yaitu: sejarah akuntansi tradisional dan sejarah akuntansi baru (Nawang Sari & Hanun, 2020; Carnegie, 2014; Gomes, 2008; Funnell, 1996; Edward & Walker, 2009; Sukoharsono, 1998). Pandangan yang dihadirkan sejarah akuntansi baru menjadi pijakan dalam penelitian ini. Dengan mengambil latar belakang sejarah akuntansi Indonesia khususnya masa Kerajaan Majapahit untuk mengetahui bentuk pemungutan pajak di masa kerajaan Majapahit, membawa peneliti memilih menggunakan pemikiran terkait kuasa akuntansi.

Pandangan umum mengenai konsep kuasa menjadi berbeda dalam pemikiran Foucault. Cara kerja kuasa tidak melalui pembatasan yang berbau represif (Foucault, 1977). Kuasa bermutasi secara lebih halus dalam aturan-aturan yang berfungsi untuk membatasi. Penerapan kuasa terjadi di banyak lokasi strategis yang saling berhubungan dan terus berkembang. Bagi Foucault kuasa adalah sebuah strategi bukan pemilikan atau subjek berkuasa yang mampu menutupi keberadaan dirinya sendiri (kuasa) sehingga terkadang keberadaannya tidak disadari. Jika ada susunan, aturan-aturan, sistem-sistem regulasi dengan melibatkan manusia, maka disitulah kuasa bekerja (Foucault, 1977).

Foucault lahir 15 Oktober 1926 di Perancis yang tumbuh dewasa dalam keluarga berlatarbelakang pendidikan tinggi. Dalam studi sejarah, Foucault termasuk dalam katagori madzhab annales. Sebagian besar penelitian Foucault berfokus pada sejarah budaya masyarakat modern dari sudut pandang kekuasaan dan pengetahuan. Oleh karena itu, subjek modern merupakanw1 kendaraan bagi kekuasaan dan objek bagi pengetahuan. Menurut Foucault, kekuasaan tidak dipahami dalam arti bahwa itu dimiliki oleh kelompok institusional dan digunakan untuk menjamin bahwa warga negara tunduk pada negara. Kekuasaan juga bukan mekanisme dominasi; ini berlaku dalam hubungan yang mendominasi dengan yang didominasi atau yang kuat dengan yang lemah. Kekuasaan tidak sama dengan kedaulatan suatu negara atau institusi hukum yang menginginkan dominasi atau penguasaan dari luar.

Beberapa riset genealogi atau perluasannya dalam konteks kuasa Foucault memberikan gambaran akan kuasa akuntansi sebagai alat untuk membentuk manusia agar bisa dikendalikan (*governable person*). Strategi kuasa akuntansi dengan pemikiran Foucault berujung sebagai bentuk disiplin diri, teknologi diri dan ukuran kinerja yang digunakan sebagai alasan rasionalits ekonomi dalam mencapai efisiensi organisasi. Dalam proses penelitian, penggunaan Metodologi kuasa Foucault belum dirasa cukup merangkum realitas historis saat itu. Selanjutnya peneliti mendapatkan pemikiran kuasa yang lebih lengkap dan sesuai dengan kondisi Kerajaan Majapahit, yaitu kekuasaan Gayatri.

Dalam domain kesaktian spiritual, kuasa Gayatri mewakili jenis kuasa yang terkait dengan carapandang melihat realitas. Menurut perspektif budaya Jawa,

tempat Majapahit berdiri, realitas alam semesta sangat beragam dan merupakan bukti eksistensi Tuhan. Pandangan ini menolak ide dualisme karena semua hal di dunia saling melengkapi. Keberagaman tersebut dianggap sebagai satu kesatuan yang kuat. Mereka tidak dibagi menjadi bidang yang terpisah dan tanpa hubungan satu sama lain, tetapi lebih dari itu.

Metodologi kuasa Gayatri adalah salah satu penelitian baru yang dilakukan oleh Lutfillah pada tahun 2021 dan dicatat lengkap pada buku yang berjudul *Gayatri Akuntan Majapahit*. Menurut Lutfillah pemikiran gayatri tentang kuasa tidak lagi sekadar berkaitan tentang susunan negara, melainkan juga untuk mengakui kekuasaan tertinggi yang berdaulat bersumber pada tahta tertinggi yang bernama Tuhan. Selain itu, pengidentifikasian daerah sebagai daerah yang mempunyai otonomi paling besar merupakan suatu bentuk pengendalian dimana kuasa akuntansi bukan sekadar mengatur tanggung jawab, hak dan kewajiban daerah. Wilayah-wilayah yang dibebaskan, meskipun tidak berada di bawah kendali langsung pemerintah pusat dan tanpa pengawasan satuan militer, terancam oleh kutukan (*sapatha*) yang ditulis bagi mereka yang tidak setia kepada raja.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa praktik akuntansi mempunyai bentuk yang tidak statis. Perubahan akuntansi dapat berkembang seiring waktu dan fleksibel tergantung pada lokasi akuntansi. Setiap wilayah, negara atau konteks tertentu mempunyai hak untuk menentukan arti dan bentuk akuntansi. Dengan semakin luasnya pengungkapan artikel terkait akuntansi, maka akan memberikan wacana untuk memahami dan memperjelas keberadaan akuntansi itu sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, fokus penelitian ini adalah seperti apa Sistem Pemungutan Pajak melalui Analisis kuasa Akuntan Gayatri berdasarkan Metodologi Paradigma Nusantara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendekonstruksi kuasa Akuntan Gayatri dalam Sistem Pemungutan Pajak berdasarkan Metodologi Paradigma Nusantara.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat akademis dan manfaat umum. Manfaat akademis atau teoritis adalah manfaat yang digunakan sebagai pengembangan ilmu bagi pembaca ataupun peneliti selanjutnya. Sedangkan manfaat umum adalah manfaat untuk memberikan pengetahuan terutama bagi mahasiswa/i maupun para dosen bahwa Indonesia memiliki sejarah akuntansi sendiri yang sudah diwariskan dari masa kerajaan Majapahit.

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi akademi untuk menambah referensiteori bagi sistem prtpajakan dan akuntansi keprilakuan, juga sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya dalam pembahasan mengenai sejarah akuntansi.

b. Manfaat Praktis

Manfaat umum dalam penelitian ini adalah sebagai media pertukaran pikiran mengenai cara kerja kuasa akuntan gayatri dalam sistem pemungutan pajak di masa kerajaan Majapahit yang bisa digunakan dalam referensi perhitungan pajak.

1.5 Sistematika Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penjabaran latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini menyajikan beberapa teori yang digunakan peneliti sebagai dasar analisis juga menjadi bahan perbandingan dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menyajikan tentang metode yang digunakan peneliti antara lain: jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri atas uraian data yang dilakukan peneliti meliputi: peran akuntan Gayatri, identifikasi pajak di masa Kerajaan Majapahit, sistem pemungutan pajak Kerajaan Majapahit, sistem pemungutan pajak saat ini,

pengaruh sistem pemungutan pajak Majapahit terhadap sistem perpajakan saat ini.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.